

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cepokorejo dari awal belum efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat penerima bantuan terhadap program BPNT seperti nama, aturan dan nominal yang seharusnya berhak mereka dapatkan, minimnya informasi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat menunjukkan adanya kekurangan dalam proses komunikasi antara pemerintah desa cepokorejo dengan masyarakat penerima bantuan, selain itu keresaharan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dimana masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan padahal layak untuk menerima program BPNT, adanya ketidaksesuaian antara sasaran program BPNT dengan realitas di lapangan, Ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data yang ada dengan kondisi aktual di lapangan tidak sesuai beberapa keluarga yang seharusnya memenuhi kriteria miskin tidak menerima bantuan sementara beberapa keluarga yang seharusnya tidak memenuhi kriteria menerima bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program BPNT di Desa Cepokorejo terindikasi adanya praktik fenomena *Elite Capture* yang terjadi dalam proses penyaluran kepada masyarakat penerima bantuan. hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari internal pemerintah desa maupun

sumber daya manusia desa cepokorejo, lemahnya mekanisme pengawasan dan pengendalian internal pemerintah desa ceppokorejo serta kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum memungkinkan *elite capture* bertindak tanpa rasa takut akan konsekuensi, sehingga praktik yang dilakukan *Elite Capture* yakni Sekretaris desa cepokorejo melampaui batas tidak sesuai dengan aturan dan sop yang ada. Selain itu faktor sumber daya manusia di desa cepokorejo mempengaruhi terjadinya praktik *elite capture* dimana rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan kesadaran proses politik dari masyarakat setempat membuat kurangnya pemahaman masyarakat penerima bantaun atas hak-hak serta kewajiban yang seharusnya mereka ketahui terhadap program BPNT.

Hasil studi ini memberikan wawasan terkait monitoring dan transparansi yang menjadikan satu kesatuan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa secara lebih efektif, yang mana didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi sehingga mampu memperkecil peluang terjadinya praktik fenomena *Elite Capture* dalam program-program sosial yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat mekanisme seperti ini diharapkan pelaksanaan program-program sosial dapat lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan dampak positif program BPNT, perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi tentang besaran bantuan, serta evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian manfaat yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat penerima.

Dengan demikian, program BPNT dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cepokorejo dan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

2. Diperlukan upaya untuk memperbarui data secara berkala, meningkatkan transparansi dalam proses penentuan penerima bantuan, serta melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi program. Hanya dengan demikian program BPNT dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mengurangi kemiskinan dengan lebih efektif.
3. Selain itu dilakukan pendampingan upaya penanggulangan penyalagunaan dana program BPNT oleh Sekretaris desa dapat dilakukan dengan cara pengawasan, oleh semua pihak mulai dari internal pemerintah desa, tokoh masyarakat serta tingkat yang paling bawah yakni masyarakat desa cepokorejo hal ini guna meminimalisir penyelewengan dana program BPNT.